

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) saat ini merupakan suatu permasalahan yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia dan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Kasus-kasus KKA yang terus terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor swasta namun kini merambah pada sektor publik. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah dan berbagai organisasi publik lainnya. Perhatian tersebut saat ini lebih besar dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya serta terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik untuk lembaga-lembaga sektor publik.

Masyarakat menilai bahwa KKA ini perlu diberantas karena dalam kurun waktu yang singkat KKA dapat merugikan sebuah organisasi. Banyak pihak yang setuju dalam menghadapi bahaya KKA kita perlu memperkecil peluang terjadinya KKA melalui berbagai kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam sebuah negara ikut serta dalam strategi penanggulangan KKA atau korupsi yang diwujudkan dalam peraturan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, serta Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta beberapa peraturan lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat seharusnya dapat dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Namun kenyataannya tindakan KKA tetap terus terjadi. Hal tersebut membuat semua pihak terus mencari penyebab terjadinya tindakan KKA, seiring dengan perkembangan zaman maka modus KKA terus berkembang semakin canggih dan melibatkan berbagai pihak secara struktural. Banyak pihak yang terus dirugikan dengan tindakan KKA tersebut.

Menurut Thoyibatun (2008) KKA diindikasikan oleh adanya bentuk tindakan dan kebijakan sengaja untuk tujuan menipu atau manipulasi sehingga merugikan pihak lain. Kecurangan akuntansi yang terjadi di USA menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri (Spathis *et al*, 2002). Kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia sangat erat dengan korupsi. Tindakan yang pada umumnya dilakukan saat korupsi diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark-up*. Korupsi tersebut merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertengahan tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan terdapat temuan sebesar Rp 1,6 triliun yang tidak wajar dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011. BPK merincikan 12 temuan yang tidak wajar dalam laporan keuangan Kemendikbud diantaranya terdapat perbedaan hasil rekonsiliasi pendapatan menurut Kemendikbud dengan

Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp86 miliar, belanja yang bersumber dari hibah senilai Rp210 miliar pada beberapa universitas dan Dirjen PAUD yang belum diajukan pengesahannya pada DJPU dan belum dilaporkan dalam laporan keuangan, dan piutang pada Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp 338 miliar yang tidak seluruhnya disajikan dalam laporan keuangan, dan ada juga temuan yang berulang dari laporan keuangan tahun sebelumnya berupa dana bantuan sosial yang belum disalurkan dan masih mengendap di rekening perguruan tinggi senilai Rp 43 miliar ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

Pada akhir tahun 2012, masyarakat di Indonesia digemparkan oleh kasus korupsi yang melanda beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Berdasarkan telaah Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI terhadap hasil audit BPK RI, negara mengalami kerugian hingga Rp 309,7 miliar. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berbentuk beberapa tindakan seperti pengadaan yang tidak sesuai kontrak, *mark up* anggaran, pembangunan fisik yang tak terselesaikan, serta persaingan dalam tender yang tidak sehat.

Sektor pemerintahan menjadi salah satu lahan yang dianggap signifikan bagi praktik korupsi. Hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester I yang memuat pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, selain memuat pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Temuan pemeriksaan BPK tersebut meliputi 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Berdasarkan jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya merupakan kasus

penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari temuan senilai Rp8,92 triliun tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp311,34 miliar ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Semakin tingginya anggaran pemerintah menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku tindak kecurangan. Hasil penelitian Sheifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) dalam Puspasari dan Suwardi (2012) menunjukkan bahwa tingkat korupsi suatu negara mempengaruhi kecurangan akuntansi.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai lembaga publik diharapkan memiliki ciri dan komunitas yang berbeda dengan lembaga layanan publik lainnya dan terpelihara dari KKA (Toenlice, 2007 dalam Thoyibatun, 2008). Namun beberapa kasus yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan KKA dapat menyerang organisasi apapun tidak terkecuali PTN. Menurut Schwartz, Larson, dan Kranacher (2008),

*“Reasons for the particular vulnerability of universities to fraud tend to boil down to the late Donald Cressey’s Fraud Triangle: the incentives and pressures to steal are strong, given relatively moderate salary levels and the reluctance of most universities to prosecute from fear that fundraising will be hurt by negative publicity; the opportunities are ample given the usual lack of segregation of duties due to ongoing budget cuts; and rationalization is easy in an environment with little comprehensive oversight where there is a perception that everyone is doing it, especially those at the highest levels of the institution.”*

Oleh karena itu untuk dapat menangani tindakan KKA tersebut perlu diadakannya penelusuran lebih lanjut serta identifikasi sebab-sebab utama terjadinya KKA. Hasil penelusuran tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam merumuskan strategi yang lebih tepat dan handal untuk menurunkan taraf terjadinya KKA.

Menurut Tuanakotta (2007) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Effendi (2009) dalam wirda, Darwanis, dan Abu Bakar (2012) mengemukakan bahwa,

“pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang.”

Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar (Hermiyetti, 2011).

Sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat otonomi yang semakin besar. Berdasarkan hasil *KMPG Fraud Survey 2012* ditemukan bahwa *fraud* terjadi karena pelaku internal tidak berfikir mereka akan tertangkap, ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 25% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian internal yang telah ada sebesar 23%, kemudian tidak memadainya pengendalian internal juga menjadi faktor terjadinya *fraud* yaitu sebesar 7%, sehingga dapat dilihat bahwa pengendalian internal memiliki fungsi yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk universitas.

Selain sistem pengendalian internal, Erickson (2004) menyampaikan bahwa penjelasan yang memunculkan dugaan penipuan terletak pada kompensasi dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dihadapi oleh eksekutif. Sistem kompensasi merupakan salah satu sub sistem yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, baik pada organisasi publik maupun swasta karena menurut Aisyah (2006) sistem kompensasi merupakan mekanisme penting untuk memotivasi manajer dalam mencapai tujuan organisasi.

Sistem kompensasi pada organisasi sektor publik di Indonesia masih menganut sistem tradisional. Penentuan gaji, bonus, remunerasi, tunjangan dan berbagai insentif lainnya masih ditentukan oleh jenjang kepangkatan, golongan dan senioritas. Persoalan kompensasi seringkali ditengarai menjadi penyebab rendahnya kinerja birokrat karena penentuan gaji tidak didasarkan atas kinerja, hal tersebut diperkirakan memicu terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Penelitian Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang memadai membuat *agent* bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal*.

Menurut Nicholson (1997) yang dicatat dalam Wilopo (2006) bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) dipengaruhi oleh situasi asimetri informasi. Informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena manajer cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya. Asimetri informasi yang terjadi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyanto, 2007).

Menurut Cheng, Davidson, dan Leung (2008) terjadi asimetri informasi yang lebih besar ketika orang dalam memiliki informasi mengenai kinerja perusahaan yang buruk daripada informasi kinerja perusahaan yang baik. Informasi yang diberikan manajemen kepada pimpinan merupakan informasi yang dapat digunakan pimpinan/pemilik dalam membuat rangkaian tindakan efektif yang terbaik. Jika pimpinan/pemilik menerima informasi yang tidak sesuai dengan kondisi organisasi pada saat itu maka pimpinan/pemilik dapat melakukan tindakan

yang salah dan dapat merugikan organisasi dan dilain sisi akan memberikan keuntungan kepada pihak lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal, Sistem Kompensasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan dalam latar belakang yaitu kesesuaian SPI, sistem kompensasi, dan asimetri informasi dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
2. Apakah sistem kompensasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris dari pengaruh kesesuaian sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, dan asimetri informasi terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dari penelitian ini akan mampu memberikan wawasan tambahan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliahan tentang sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, asimetri informasi dan kecurangan akuntansi khususnya yang terjadi pada organisasi perguruan tinggi negeri.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, asimetri informasi dalam mencegah terjadinya kecurangan pada perguruan tinggi.